

Transparansi Pengelolaan Keuangan melalui Prosedur Pencatatan di Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire

Muhammad Wahiruddin^{1*}, Baharuddin², Kristian Hoegh Pride Lambe³

^{1,2,3}Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:

rbn1629@gmail.com^{1*}

*Penulis korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pencatatan keuangan di Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire serta kontribusinya dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan. Transparansi keuangan merupakan prinsip utama *good governance* yang menuntut keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan lima informan kunci yang berperan langsung dalam pengelolaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan keuangan telah dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan dukungan aplikasi SIPKD, serta prosedur verifikasi berjenjang yang melibatkan bendahara, kepala sub bagian, dan pimpinan dinas. Prosedur ini dinilai cukup mendukung transparansi internal, meskipun keterbukaan eksternal kepada masyarakat masih terbatas. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, gangguan teknis sistem, keterlambatan dokumen, serta lemahnya koordinasi antarunit. Solusi yang direkomendasikan antara lain peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi, dan pengembangan mekanisme transparansi berbasis digital. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi prosedur pencatatan yang akuntabel dengan komitmen manajerial guna meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan publik.

Kata kunci: pencatatan keuangan, transparansi, pengelolaan keuangan publik, akuntabilitas, Nabire

Abstract

This study aims to analyze the financial recording procedures implemented by the Department of Industry in Nabire Regency and their contribution to ensuring transparency in financial management. Financial transparency, as one of the key principles of good governance, requires openness and accountability in managing public budgets. This research employs a descriptive qualitative approach using interviews, observations, and document analysis with five key informants directly involved in financial management. The findings reveal that financial recording procedures generally comply with Government Accounting Standards (SAP) and are supported by the SIPKD application, complemented by a multi-layered verification process involving the treasurer, subdivision heads, and department leadership. These procedures adequately support internal transparency, although external disclosure to the public remains limited. The main challenges identified include limited staff competence, technical disruptions in the system, delays in document submission, and weak inter-unit coordination. Recommended solutions include strengthening human resource capacity, improving technological infrastructure, and developing digital-based transparency mechanisms. This study highlights the importance of integrating accountable financial recording procedures with strong managerial commitment to enhance transparency and accountability in public financial governance.

Keywords: financial recording, transparency, public financial management, accountability, Nabire

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan sektor publik yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu indikator utama penerapan *good governance* di tingkat pemerintah daerah. Transparansi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, tetapi juga sebagai instrumen dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah (Ramadhani, 2021). Regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, secara tegas mengamanatkan penerapan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai standar untuk mendukung keterbukaan informasi keuangan. Dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur.

Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kewajiban dalam mengelola anggaran secara efisien dan transparan. Prosedur pencatatan keuangan menjadi aspek krusial dalam memastikan setiap transaksi tercatat dengan akurat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, beberapa kendala masih ditemukan, seperti keterlambatan pelaporan, keterbatasan kompetensi aparatur, serta kendala teknis dalam penggunaan aplikasi keuangan berbasis digital. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keberhasilan transparansi pengelolaan keuangan sangat dipengaruhi oleh kualitas pencatatan keuangan, kapasitas aparatur, serta efektivitas sistem pengawasan internal (Khoirunnisa, 2025; Perdana, 2020).

Selain itu, perkembangan sistem informasi akuntansi berbasis digital di sektor publik juga menjadi perhatian penting. Menurut Simatupang (2019), integrasi teknologi dalam pencatatan keuangan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi, namun tetap memerlukan kesiapan sumber daya manusia untuk mengoperasikannya. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, yang pada akhirnya berpotensi menghambat upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Penelitian ini penting dilakukan karena transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah masih menjadi isu strategis dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, khususnya di wilayah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia seperti Kabupaten Nabire. Dengan menganalisis prosedur pencatatan keuangan yang berlaku, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam perbaikan sistem pencatatan serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai praktik akuntansi sektor publik dengan menekankan keterkaitan antara prosedur pencatatan dan pencapaian transparansi keuangan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pencatatan keuangan yang diterapkan pada Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire?
2. Apakah prosedur pencatatan tersebut telah mendukung transparansi pengelolaan keuangan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pencatatan keuangan di Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire?

TINJAUAN LITERATUR

Pencatatan Keuangan

Pencatatan keuangan merupakan proses sistematis untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi keuangan ke dalam laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mulyadi (2016), sistem pencatatan keuangan berfungsi menyediakan informasi relevan yang digunakan dalam pengambilan keputusan serta pengendalian organisasi. Dalam konteks sektor publik, pencatatan harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat diandalkan, transparan, dan memenuhi prinsip akuntabilitas.

Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik

Transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi keuangan kepada publik secara jelas dan mudah diakses (Yusuf, 2019). Akuntabilitas mengacu pada kewajiban entitas pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat (World Bank, 2004). Beberapa penelitian menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas saling berkaitan erat dan keduanya menjadi syarat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Ramadhani, 2021). Dalam praktiknya, keterbatasan kompetensi aparatur, lemahnya pengawasan internal, dan kendala teknis sering menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip ini (Lestari, 2020).

Good Governance dalam Keuangan Daerah

Prinsip *good governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik. Dalam pengelolaan keuangan daerah, penerapan prinsip ini diatur melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian oleh Simatupang (2019) menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi dapat memperkuat transparansi, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia..

Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian relevan telah dilakukan terkait pencatatan dan transparansi keuangan publik. Khoirunnisa (2025) menemukan bahwa penerapan pencatatan keuangan digital di sektor UMKM dapat meningkatkan transparansi serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian oleh Perdana (2020) di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) secara digital telah mendukung transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih terkendala keterbatasan SDM yang melek teknologi. Pajouw, Poputra, dan Afandi (2015) juga menemukan bahwa pencatatan keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Sulawesi Utara masih menghadapi hambatan berupa keterlambatan pelaporan dan lemahnya pengawasan internal.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa prosedur pencatatan keuangan yang sesuai standar sangat berpengaruh terhadap terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, namun masih dipengaruhi oleh faktor kapasitas aparatur dan efektivitas sistem pengawasan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif dengan desain deskriptif** yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena prosedur pencatatan keuangan dalam kaitannya dengan transparansi pengelolaan keuangan di sektor publik. Menurut Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti menggambarkan secara rinci proses sosial maupun administratif berdasarkan perspektif partisipan penelitian. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji praktik pencatatan keuangan yang bersifat kontekstual dan bergantung pada kebijakan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia.

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, dengan waktu pelaksanaan selama dua bulan pada tahun 2025. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Dinas Perindustrian merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewajiban mengelola anggaran daerah secara transparan dan akuntabel, namun menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan pencatatan keuangan. Lokasi penelitian juga dipilih secara purposif karena kasus transparansi keuangan di Nabire mencerminkan fenomena umum yang terjadi pada banyak pemerintah daerah di Indonesia.

Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire yang terlibat dalam proses pengelolaan dan pencatatan keuangan. Dari populasi tersebut, dipilih **lima orang informan kunci** dengan teknik **purposive sampling**, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Informan kunci yang diwawancarai terdiri dari Kepala Dinas, Bendahara Pengeluaran, Kepala Subbagian Program, Kepala Subbagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian, serta auditor internal dari Inspektorat Daerah. Mereka dipilih karena

memiliki pengetahuan mendalam dan keterlibatan langsung dalam proses pencatatan serta pelaporan keuangan di instansi tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semiterstruktur untuk memperoleh informasi detail mengenai prosedur pencatatan, praktik transparansi, dan kendala yang dihadapi. Observasi digunakan untuk melihat langsung proses pencatatan keuangan dan implementasi sistem aplikasi keuangan daerah (SIPKD). Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen pendukung seperti SOP pencatatan keuangan, laporan keuangan, serta hasil audit internal dan eksternal. Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk meningkatkan validitas melalui triangulasi (Denzin & Lincoln, 2018).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan matriks untuk mempermudah interpretasi. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan serta memverifikasi hasil analisis dengan membandingkan antar sumber data. Proses analisis dilakukan secara simultan sejak pengumpulan data hingga akhir penelitian, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan secara holistik prosedur pencatatan keuangan dan implikasinya terhadap transparansi pengelolaan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan lima orang informan kunci yang dipilih secara purposif karena memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pencatatan keuangan di Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire. Karakteristik responden disajikan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Peran Utama dalam Pencatatan Keuangan
1	Yohanis Kombong, S.E., M.Si	Kepala Dinas Perindustrian	Penanggung jawab utama pengelolaan dan pengesahan laporan
2	Aprianni Rosa Sembor	Bendahara Pengeluaran	Mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan
3	Yune Amasaman, S.Sos	Auditor Inspektorat Daerah	Pengawas dan pemeriksa laporan keuangan
4	Akbar Taufik Ismail, S.T	Kepala Subbagian Program	Penyusun rencana kegiatan dan anggaran
5	Christin Zivarany, S.T	Kepala Subbagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	Koordinator administrasi dan verifikasi laporan

Sumber: Data primer hasil wawancara, 2025

Hasil Wawancara

Untuk memperkuat temuan, peneliti merangkum hasil wawancara dengan para informan ke dalam **Tabel 2** berikut.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Wawancara

Rumusan Masalah	Temuan Utama dari Wawancara
1. Prosedur pencatatan keuangan yang diterapkan	Seluruh informan menyatakan bahwa pencatatan dilakukan melalui aplikasi SIPKD , dengan tahapan mulai dari pengumpulan bukti transaksi, pencatatan oleh bendahara, verifikasi oleh bagian keuangan, hingga pengesahan oleh kepala dinas. Proses ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta SOP dari BPKAD.
2. Dukungan terhadap transparansi	Pencatatan mendukung transparansi internal , karena laporan dapat diakses oleh pimpinan, Inspektorat, dan BPKAD. Audit rutin dilakukan setiap tahun. Namun, transparansi eksternal kepada publik masih terbatas, hanya berupa laporan pertanggungjawaban tahunan.
3. Kendala yang dihadapi	Kendala utama meliputi: keterbatasan kompetensi SDM, gangguan teknis sistem SIPKD dan jaringan internet, keterlambatan dokumen dari bidang teknis, serta lemahnya koordinasi antarunit. Meski demikian, kesalahan dapat diminimalisir melalui verifikasi berlapis.

Sumber: Hasil wawancara, 2025

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pencatatan keuangan di Dinas

Perindustrian Kabupaten Nabire telah dilaksanakan sesuai dengan **Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)** dan menggunakan aplikasi resmi pemerintah daerah yaitu **SIPKD**. Proses pencatatan melibatkan beberapa pihak, termasuk bendahara, kepala subbagian keuangan, dan kepala dinas sebagai penanggung jawab. Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyadi (2016) yang menekankan pentingnya sistem pencatatan yang sistematis dan terstandar dalam menyediakan informasi akuntabel.

Temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa prosedur pencatatan keuangan telah mendukung **transparansi internal**. Laporan keuangan disusun secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan) dan dapat diakses oleh pihak pengawas seperti Inspektorat dan BPK. Audit rutin yang dilakukan menunjukkan adanya mekanisme pengawasan yang baik. Namun, keterbukaan kepada masyarakat luas masih terbatas. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara prinsip transparansi dalam regulasi dengan praktik di lapangan (Ramadhani, 2021).

Kendala utama yang dihadapi mencakup keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, gangguan teknis sistem, serta lemahnya koordinasi antarunit. Kondisi ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Pajouw, Poputra, dan Afandi (2015), yang menemukan bahwa hambatan serupa juga terjadi pada unit pelaksana teknis di pemerintah daerah. Dengan demikian, meskipun sistem dan prosedur pencatatan sudah memadai, efektivitasnya sangat ditentukan oleh kapasitas aparatur dan dukungan infrastruktur.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah yang diajukan. Pertama, prosedur pencatatan keuangan di Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire telah sesuai dengan SAP dan mendukung pengelolaan keuangan yang sistematis. Kedua, prosedur tersebut sudah mampu mendukung transparansi internal meskipun belum optimal dalam transparansi eksternal. Ketiga, masih terdapat kendala teknis dan sumber daya manusia yang perlu diatasi agar sistem pencatatan dapat lebih efektif dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prosedur pencatatan keuangan dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan

pada Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, prosedur pencatatan keuangan telah dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan menggunakan aplikasi SIPKD, dengan mekanisme verifikasi berlapis mulai dari bendahara, kepala subbagian, hingga kepala dinas. Hal ini menunjukkan adanya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Kedua, prosedur pencatatan keuangan yang diterapkan sudah mendukung transparansi internal, karena laporan dapat diakses oleh pimpinan dan instansi pengawas, serta diaudit secara berkala oleh Inspektorat dan BPK. Namun, transparansi eksternal kepada masyarakat masih terbatas, hanya berupa laporan tahunan yang bersifat umum.

Ketiga, masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas pencatatan keuangan, seperti keterbatasan kompetensi aparatur, gangguan teknis pada sistem SIPKD, keterlambatan dokumen dari unit teknis, dan lemahnya koordinasi antarbagian. Kendala ini berpotensi menurunkan kualitas akurasi dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Saran

Sejalan dengan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan. **Pertama**, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis secara berkala perlu dilakukan agar aparatur lebih memahami prosedur pencatatan sesuai SAP dan mampu mengoperasikan sistem aplikasi keuangan dengan baik.

Kedua, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, termasuk perbaikan jaringan internet dan pemeliharaan sistem SIPKD, menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran pencatatan dan pelaporan keuangan.

Ketiga, perlu dibangun mekanisme koordinasi internal yang lebih efektif, misalnya dengan penunjukan penanggung jawab pencatatan di tiap bidang serta jadwal pengumpulan dokumen yang jelas untuk menghindari keterlambatan.

Keempat, Dinas Perindustrian perlu mengembangkan strategi transparansi eksternal, seperti publikasi ringkasan laporan keuangan melalui website resmi atau media informasi publik, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara lebih terbuka.

Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem pencatatan keuangan di Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Khoirunnisa, F. (2025). *Implementasi akuntansi dan pencatatan keuangan digital dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan UMKM untuk mewujudkan SDGs di Kota Cirebon* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati).
- Lestari, R. (2020). Analisis penerapan akuntansi pemerintahan dalam meningkatkan transparansi keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 8(1), 23–35.
- Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 108–115. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mulyadi. (2016). *Sistem akuntansi*. Salemba Empat.
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 1–6. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254>
- Pajouw, R. V., Poputra, A. T., & Afandi, D. (2015). Analisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1), 77–86.
- Perdana, R. (2020). *Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Kabupaten Purworejo* (Tesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta).
- Ramadhani, A. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 56–65.
- Sabandar, S., Tangdialla, R., & Tangdialla, L. (2022). Accountability And Transparency in The Industrial Revolution 4.0 Era at Private Universities in Makassar. *Proceedings of the 1st Warmadewa International Conference on Science, Technology and Humanity, WICSTH 2021, 2012*. <https://doi.org/10.4108/eai.7-9-2021.2318248>
- Sangganafa, M., Lambe, K. H. P., & Baka, A. (2025). Pelayanan Publik di Distrik Nabire Kota: Kajian Peran Pegawai dan Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Kelembagaan. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 22–28. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.300>
- Simatupang, T. (2019). Sistem informasi keuangan daerah sebagai penunjang transparansi. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 11(3), 41–50.
- Sombo, S., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kualitatif di DPMPSTSP Kabupaten Dogiyai). *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 61–69. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/990/>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- World Bank. (2004). *Governance and development*. World Bank Publications.
- Yusuf, M. (2019). *Good governance dan transparansi keuangan publik*. Alfabeta.